

TESIS

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (KONSEP
2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN**



ANANDA DIAN TIFANO FATEM

No. Mhs.: 155202426/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**



PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ananda Dian Tifano Fatem

Nomor Pokok Mahasiswa : 155202426

Konsentrasi : Litigasi

Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP
(Konsep 2017) dan Potensi Kriminalisasi yang
Berlebihan

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

30-07-2019

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.


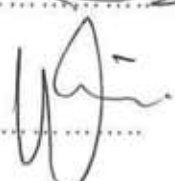

30-07-2019



PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Ananda Dian Tifano Fatem
Nomor Pokok Mahasiswa : 155202426/PS/MIH
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Perzinahan Dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP
(Konsep 2017) dan Potensi Kriminalisasi yang
Berlebihan

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal.....

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum	


Ketua Program Studi:

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

MOTTO

“ JIKALAU KAMU TINGGAL DI DALAM AKU DAN FIRMAN-KU TINGGAL DI DALAM KAMU, MINTALAH APA SAJA YANG KAMU KEHENDAKI DAN KAMU AKAN MENERIMANYA “ (YOHANES 15:7)

“JADILAH DIRIMU SENDIRI KARENA ENKAU BERHARGA, TIDAK PERNAH ADA ORANG YANG SAMA SEPERTI DIRIMU DAN ENKAU SELALU DIKASIHI-NYA DENGAN CINTA YANG SAMA” – SUSTER M. FRANSITA, Fch.

“KEBERHASILAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK MELEWATI DAN MENGATASI DARI SATU KEGAGALAN KE KEGAGALAN BERIKUTNYA TANPA KEHILANGAN SEMANGAT” – WINSTON CHURCHILL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh alam semesta untuk segala berkat, kasih karunia serta rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP (Konsep 2017) dan Potensi Kriminalisasi yang Berlebihan”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian siding tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bahkan tidak ternilai bagi penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung, khususnya kepada:

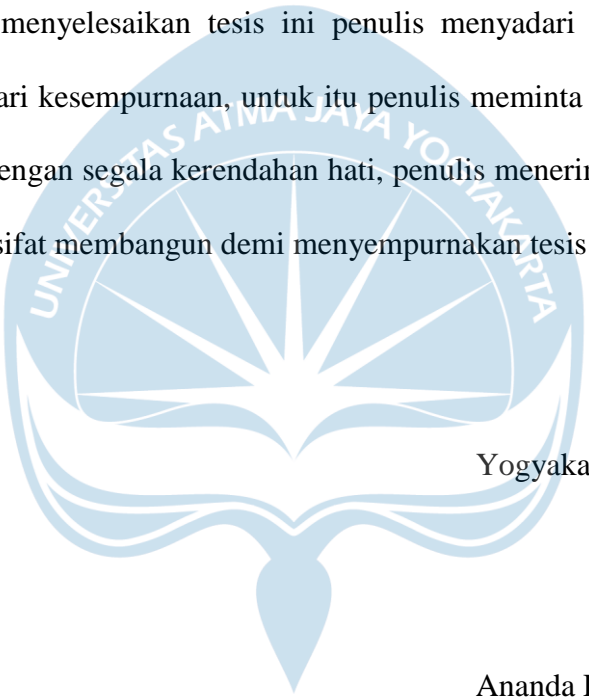
1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;

4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku Dosen penguji dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
6. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum sebagai Anggota tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat terhadap Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Yang terhormat seluruh Dosen pengajar serta staff pengelola dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
8. Untuk kedua Orangtua penulis Agustinus Fatem dan Dian Herlinawati yang hebat dan luar biasa dalam mendidik, selalu memberikan dorongan semangat dan selalu sabar dalam medampingi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Untuk saudara Penulis , yang telah mendukung dan memberikan semangat, Eka Dian Ayu Agustina Fatem, James Tuflasa, Dimas Valliant Ferdian Fatem;
10. Untuk teman terbaik seperjuangan dalam menyelesaikan Tesis, Renold Salvio Renjaan, dan teman-teman lainnya, Leonardo Barata, Regina Liem, Fx. Ray, Andi Motte, Flabianus Alaman dan untuk yang teristimewa Wilna Margaretha Dominique (Angel C.

Dominique) yang dengan sabar memberikan semangat dan motivasi untuk penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

11. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana khususnya angkatan September 2015.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan tesis ini.



Yogyakarta, 30 Juli 2019

Ananda Dian Tifano Fatem

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ananda Dian Tifano Fatem

No. Mahasiswa : 155202426/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (Konsep 2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta,

Yang menyatakan:

Ananda Dian Tifano Fatem

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP dan Potensi Kriminalisasi yang Berlebihan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan menemukan penyebab terjadinya potensi *over*-kriminalisasi pada Pasal 484 RUU KUHP dan mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab *over*-kriminalisasi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dikarenakan dalam rumusan Pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Oleh sebab itu dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) perlu dirumuskan ulang, melalui proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip biaya dan hasil, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, dan memperhatikan kapasitas/daya kerja penegak hukum.

Kata Kunci: *Over*-Kriminalisasi, Perzinahan, dan Kebijakan Hukum Pidana

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Politics of Criminal Law to Adultery Crimes in the Formulation of Article 484 of the Criminal Code Bill and the Potential for Overcriminalization". This research aims to find the cause of potential for overcriminalization in Article 484 of the Criminal Code Bill and propose the formulation of Article 484 of the Criminal Code Bill so as not to be the cause of overcriminalization in society. This research type is a normative with legal politics approach. The data source consists of secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. Methods of collecting data using literature studies and interviews. Primary legal materials and secondary legal materials are analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to draw conclusions. Legal policy theory is used in reviewing research results. The results show that the formulation of Article 484 paragraph (1) letter e and paragraph (2) has the potential to cause overcriminalization because in the formulation of the Article contains multiple interpretations. Therefore, in the formulation of Article 484 paragraph (1) letter e and paragraph (2) it needs to be reformulated, through the criminal law policy process with the consideration that the use of criminal law takes into account national development goals, takes into account the principles of costs and results, actions handled by law criminal acts must be desired actions, and pay attention to the capacity / strength of law enforcement work.

Keywords: Over-Criminalization, Adultery, and Criminal Law Policies